



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

TARGET PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengukur kinerja satuan kerja perangkat daerah atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah maka perlu menetapkan target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 10);

17. Peraturan ...

17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 02);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 20);
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 21);
24. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 34);

25. Peraturan ...

25. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 23) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 06);
26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 06);
27. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 31);
28. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 19);
29. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 22);

31. Peraturan ...

31. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 24);
33. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 30);
34. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 18);
35. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 15);
36. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 6);
37. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12);
38. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);

39. Peraturan ...

39. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 8);
40. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 4);
41. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
42. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 40);
43. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 3);
44. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 77);
45. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 50);
46. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 63);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARGET PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sesuai dengan nilai yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 2

Target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 dijabarkan secara tribulan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Februari 2019

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,


BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
TARGET PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

TARGET PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

| KODE sREKENING | URAIAN | SKPD PEMUNGUT | TARGET TA 2019 | TARGET TRIBULAN I | | TARGET TRIBULAN II | | TARGET TRIBULAN III | | TARGET TRIBULAN IV | |
|---------------------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | % | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) | % | (Rp) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.1 | Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah | | 41.092.088.640,00 | | 8.625.529.973,00 | | 18.178.333.406,64 | | 29.419.117.769,00 | | 41.092.088.640,00 |
| 4.1.1 | Hasil Pajak Daerah | | 32.949.783.600,00 | | 6.809.498.900,00 | | 14.210.333.000,00 | | 23.228.742.000,00 | | 32.949.783.600,00 |
| 4.04.02.01.00.00.4.1.1.01 | Pajak Hotel | Badan Pendapatan Daerah | 419.796.000,00 | 16 | 68.967.000,00 | 42 | 176.293.000,00 | 71 | 298.573.000,00 | 100 | 419.796.000,00 |
| 4.04.02.01.00.00.4.1.1.02 | Pajak Restoran | Badan Pendapatan Daerah | 1.494.288.000,00 | 15 | 226.576.200,00 | 32 | 483.692.000,00 | 68 | 1.021.693.000,00 | 100 | 1.494.288.000,00 |
| 4.04.02.01.00.00.4.1.1.03 | Pajak Hiburan | Badan Pendapatan Daerah | 91.200.000,00 | 16 | 14.194.400,00 | 34 | 30.871.000,00 | 69 | 62.792.000,00 | 100 | 91.200.000,00 |
| 4.04.02.01.00.00.4.1.1.04 | Pajak Reklame | Badan Pendapatan Daerah | 760.000.000,00 | 14 | 108.605.000,00 | 36 | 271.472.000,00 | 69 | 488.605.000,00 | 100 | 760.000.000,00 |
| 4.04.02.01.00.00.4.1.1.05 | Pajak Penerangan Jalan | Badan Pendapatan Daerah | 14.400.000.000,00 | 25 | 3.600.000.000,00 | 50 | 7.200.000.000,00 | 75 | 10.800.000.000,00 | 100 | 14.400.000.000,00 |
| 4.04.02.01.00.00.4.1.1.07 | Pajak Parkir | Badan Pendapatan Daerah | 32.016.000,00 | 16 | 5.048.700,00 | 34 | 10.939.000,00 | 69 | 22.144.000,00 | 100 | 32.016.000,00 |
| 4.04.02.01.00.00.4.1.1.08 | Pajak Air Tanah | Badan Pendapatan Daerah | 102.483.600,00 | 17 | 17.107.600,00 | 36 | 37.066.000,00 | 71 | 72.935.000,00 | 100 | 102.483.600,00 |
| 4.04.02.01.00.00.4.1.1.11 | Pajak Bumi dan Bangunan | Badan Pendapatan Daerah | 3.650.000.000,00 | 10 | 369.000.000,00 | 38 | 1.400.000.000,00 | 73 | 2.662.000.000,00 | 100 | 3.650.000.000,00 |
| 4.04.02.01.00.00.4.1.1.12 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | Badan Pendapatan Daerah | 12.000.000.000,00 | 20 | 2.400.000.000,00 | 38 | 4.600.000.000,00 | 65 | 7.800.000.000,00 | 100 | 12.000.000.000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------------------|--|---|------------------|-----|------------------|----|------------------|----|------------------|-----|------------------|
| 4.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | | 8.142.305.040,00 | | 1.816.031.073,00 | | 3.917.302.896,00 | | 6.190.375.769,40 | | 8.142.305.040,00 |
| 4.1.2.01 | Retribusi Jasa Umum | | 5.051.961.340,00 | | 1.087.813.575,00 | | 2.378.401.400,00 | | 3.821.565.275,00 | | 5.051.961.340,00 |
| 1.02.01.00.00.4.1.2.01.01 | Retribusi Pelayanan Kesehatan- Puskesmas | Dinas Kesehatan | 562.159.000,00 | 25 | 140.539.750,00 | 39 | 218.079.500,00 | 75 | 421.619.250,00 | 100 | 562.159.000,00 |
| 2.05.01.01.00.4.1.2.01.07 | Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan | Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan | 565.499.000,00 | 15 | 84.824.850,00 | 35 | 197.924.650,00 | 60 | 339.299.400,00 | 100 | 565.499.000,00 |
| 1.04.01.01.00.4.1.2.01.17 | Retribusi Pelayanan Penguburan /Pemakaman | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 29.000.000,00 | 25 | 7.251.000,00 | 50 | 14.502.000,00 | 75 | 21.753.000,00 | 100 | 29.000.000,00 |
| 2.09.01.01.00.4.1.2.01.19 | Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum | Dinas Perhubungan | 2.045.000.000,00 | 20 | 408.999.000,00 | 50 | 1.022.499.000,00 | 80 | 1.635.999.000,00 | 100 | 2.045.000.000,00 |
| 3.06.01.01.00.4.1.2.01.20 | Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 102.420.000,00 | 25 | 25.605.000,00 | 50 | 51.210.000,00 | 75 | 76.815.000,00 | 100 | 102.420.000,00 |
| 3.06.01.01.00.4.1.2.01.21 | Retribusi Pelayanan Pasar- Los | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 208.689.600,00 | 25 | 52.172.000,00 | 50 | 104.344.000,00 | 75 | 156.516.000,00 | 100 | 208.689.600,00 |
| 3.06.01.01.00.4.1.2.01.22 | Retribusi Pelayanan Pasar - Kios dan Bedak | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 1.212.562.740,00 | 25 | 303.140.600,00 | 50 | 606.281.000,00 | 75 | 909.422.000,40 | 100 | 1.212.562.740,00 |
| 2.09.01.01.00.4.1.2.01.25 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) - Mobil Penumpang - Minibus | Dinas Perhubungan | 52.500,00 | 100 | 52.500,00 | | | | 0,00 | 100 | 52.500,00 |
| 2.09.01.01.00.4.1.2.01.26 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) - Mobil Bus- Microbus | Dinas Perhubungan | 18.000.000,00 | 25 | 3.600.000,00 | 50 | 9.000.000,00 | 75 | 14.000.000,0 | 100 | 18.000.000,00 |
| 2.09.01.01.00.4.1.2.01.27 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) - Mobil Bus- bus | Dinas Perhubungan | 33.362.500,00 | 10 | 6.672.500,00 | 50 | 16.681.500,00 | 80 | 26.390.000,00 | 100 | 33.362.500,00 |
| 2.09.01.01.00.4.1.2.01.28 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) - Mobil Barang/ Beban - Pick Up | Dinas Perhubungan | 160.342.500,00 | 20 | 32.068.500,00 | 50 | 80.171.500,00 | 80 | 128.274.000,00 | 100 | 160.342.500,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------------------|---|--|------------------|----|----------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|
| 2.09.01.01.00.4.1.2.01.30 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) - Mobil Barang/ Beban - Pick Up | Dinas Perhubungan | 108.812.500,00 | 20 | 21.762.000,00 | 50 | 54.406.500,00 | 67 | 87.050.000,00 | 100 | 108.812.500,00 |
| 1.05.03.01.00.4.1.2.01.34 | Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 5.011.000,00 | 22 | 1.125.875,00 | 45 | 2.251.750,00 | 67 | 3.377.625,00 | 100 | 5.011.000,00 |
| 1.05.03.01.00.4.1.2.01.45 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 1.050.000,00 | 25 | 00 | 100 | 1.050.000,00 | 100 | 1.050.000,00 | 100 | 1.050.000,00 |
| 4.1.2.02 | Retribusi Jasa Usaha | | 2.512.303.200,00 | | 588.147.498,00 | | 1.254.386.496,00 | | 1.880.222.994,00 | | 2.512.303.200,00 |
| 2.05.01.01.00.4.1.2.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah & Bangunan (Taman Kota) | Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan | 2.500.000,00 | 15 | 375.000,00 | 50 | 875.000,00 | 75 | 1.500.000,00 | 100 | 2.500.000,00 |
| 2.12.01.01.4.1.2.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Penyewaan Tanah & Bangunan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 162.500.000,00 | 0 | | 40 | 65.000.000,00 | 75 | 162.500.000,00 | 100 | 162.500.000,00 |
| 1.04.01.01.00.4.1.2.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah & Bangunan (Rusunawa) | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 760.920.000,00 | 25 | 190.230.000,00 | 50 | 380.460.000,00 | 75 | 570.690.000,00 | 100 | 760.920.000,00 |
| 3.06.01.01.00.4.1.2.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Penyewaan Tanah & Bangunan (Senkuko) | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 10.640.000,00 | 0 | 0 | 100 | 10.640.000,00 | 100 | 10.640.000,00 | 100 | 10.640.000,00 |
| 2.13.01.01.00.4.1.2.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Penyewaan Tanah & Bangunan | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 62.312.500,00 | 58 | 36.362.500,00 | 66 | 41.262.500,00 | 86 | 53.362.500,00 | 100 | 62.312.500,00 |
| 1.20.03.01.00.4.1.2.02.04 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Penyewaan Tanah & Bangunan | Bagian Umum, | 51.400.000,00 | 19 | 9.900.000,00 | 59 | 30.400.000,00 | 91 | 46.900.000,00 | 100 | 51.400.000,00 |
| 4.04.01.01.00.4.1.2.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Penyewaan Tanah & Bangunan | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset | 1.124.590.000,00 | 25 | 281.145.498,00 | 50 | 562.290.996,00 | 75 | 843.436.494,00 | 100 | 1.124.590.000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------------------|---|--|----------------|----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|
| 2.09.01.01.00.4.1.2.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan | Dinas Perhubungan | 22.800.000,00 | 20 | 4.560.000,00 | 50 | 11.400.000,00 | 80 | 18.240.000,00 | 100 | 22.800.000,00 |
| 1.03.01.01.00.4.1.2.02.02 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 27.490.000,00 | 0 | 0 | 15 | 4.123.500,00 | 45 | 13.745.000,00 | 100 | 27.490.000,00 |
| 1.20.03.01.00.4.1.2.02.04 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor | Bagian Umum | 500.000,00 | 0 | 0 | 100 | 500.000,00 | 100 | 500.000,00 | 100 | 500.000,00 |
| 2.09.01.01.00.4.1.2.02.13 | Retribusi Terminal-Tempat Parkir Untuk kendaraan Penumpang & Bis Umum | Dinas Perhubungan | 3.684.500,00 | 20 | 736.000,00 | 50 | 1.841.500,00 | 80 | 2.947.000,00 | 100 | 3.684.500,00 |
| 2.09.01.01.00.4.1.2.02.15 | Retribusi Terminal-Fasilitas Lainnya Dilingkungan Terminal | Dinas Perhubungan | 19.510.200,00 | 20 | 3.902.000,00 | 50 | 9.755.000,00 | 80 | 15.600.000,00 | 100 | 19.510.200,00 |
| 2.09.01.01.00.4.1.2.02.16 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | Dinas Perhubungan | 72.000.000,00 | 25 | 14.400.000,00 | 50 | 36.000.000,00 | 75 | 57.600.000,00 | 100 | 72.000.000,00 |
| 2.09.01.01.00.4.1.2.02.16 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan | 17.976.000,00 | 25 | 4.494.000,00 | 50 | 8.988.000,00 | 75 | 13.482.000,00 | 100 | 17.976.000,00 |
| 2.13.01.01.00.4.1.2.02.16 | Retribusi Tempat Khusus Parkir GOR & Stadion | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 11.910.000,00 | 25 | 3.000.000,00 | 47 | 5.565.000,00 | 74 | 8.755.000,00 | 100 | 11.910.000,00 |
| 3.06.01.01.00.4.1.2.02.16 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 109.200.000,00 | 22 | 23.700.000,00 | 50 | 54.600.000,00 | 75 | 78.300.000,00 | 100 | 109.200.000,00 |
| 3.03.01.01.00.4.1.2.02.19 | Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Setelah Dipotong | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 61.370.000,00 | 25 | 15.342.500,00 | 50 | 30.685.000,00 | 75 | 46.027.500,00 | 100 | 61.370.000,00 |
| 4.1.2.03 | Retribusi Perizinan Tertentu | | 569.040.500,00 | | 140.072.625,00 | | 284.520.250,00 | | 420.217.875,00 | | 569.040.500,00 |
| 2.12.01.01.00.4.1.2.03.01 | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 560.290.500,00 | 25 | 140.070.000,00 | 50 | 280.140.000,00 | 75 | 420.210.000,00 | 100 | 560.290.500,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------------------|--|--|--------------|---|---|----|--------------|----|--------------|-----|--------------|
| 2.12.01.01.00.4.1.2.03.04 | Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 8.750.000,00 | 0 | 0 | 50 | 4.375.000,00 | 50 | 4.375.000,00 | 100 | 8.750.000,00 |
| | | | | | | | | | | | |

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO